

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

I Made Aditya Pramatha¹

A.A.N.B. Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali Indonesia.
email: adityapramartha@gmail.com / Telp: +62 812 37 02 92 52.

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Populasi yang digunakan yaitu seluruh data dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Laporan Indeks Pembangunan Manusia seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Provinsi Bali tahun 2011-2016. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampel jenuh. Analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh positif signifikan pada indeks pembangunan manusia. Belanja modal tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, belanja modal, investasi swasta, indeks pembangunan manusia.

ABSTRACT

The purpose of this study is to prove empirically about the effects of fiscal decentralization, capital expenditure, and private investment on the human development index. This research was conducted in all regencies / cities in Bali Province. The population used was all of the data on Region Budget Realization Report and Human Development Index in all regencies / cities in Bali Province in 2011-2016. The sampling method used was saturation. The research data was processed using multiple linear regression analysis technique. The results of this study proves empirically that fiscal decentralization and private investment had a significant positive effect on Human Development Index. Capital expenditure did not have an effect on Human Development Index.

Keywords: Fiscal decentralization, capital expenditure, private investment, human development index

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali hingga tahun 2016 telah mencapai 73,65 poin. Namun capaian yang baik dari angka IPM Provinsi Bali ini belum dapat dirasakan oleh seluruh daerah di Provinsi Bali. Masih ada beberapa daerah di Provinsi Bali yang capaian IPM daerahnya belum mencapai 73,65 poin. Indeks Pembangunan Manusia merupakan

salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan/kinerja dari suatu negara maupun suatu wilayah pada bidang pembangunan manusia (Artaningtyas, 2011). Kesenjangan angka capaian IPM masing-masing daerah di Provinsi Bali menunjukkan adanya indikasi proses desentralisasi fiskal dalam kebijakan otonomi daerah belum dapat berjalan secara maksimal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan instrument kebijakan fiskal seperti memaksimalkan penggunaan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan belanja untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia. Pendapatan keuangan daerah merupakan suatu kemampuan daerah yang semestinya dapat dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah. Anggaran semestinya dapat dimanfaatkan secara produktif, yakni dialokasikan pada bidang yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti bidang pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan bidang kesehatan. Indikator dalam pengukuran level desentralisasi fiskal salah satunya menggunakan rasio total Pendapatan Asli Daerah pada total keseluruhan pendapatan daerah tersebut (Isnaeni, 2016).

Bila dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Bali tahun 2015, jumlah PAD tertinggi terdapat pada Kabupaten Badung yakni sebesar Rp 3.001.464.263.000 kemudian di urutan kedua ditempati oleh Kota Denpasar yakni sebesar Rp 776.214.149.000, serta di urutan terakhir adalah Kabupaten Bangli yakni sebesar Rp 87.731.141.000. Jika diselaraskan dengan data capaian IPM pada masing-masing daerah di Provinsi Bali, menunjukkan suatu fenomena dimana dengan PAD tertinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Badung namun

belum mampu mencapai angka IPM tertinggi, serta Kabupaten Bangli dengan pendapatan asli daerah terendah namun pada capaian angka IPM tidak menjadi yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal pada masing-masing daerah di Provinsi Bali masih belum maksimal, serta perlu dioptimalisasi lagi agar dapat lebih mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih mengoptimalkan proses desentralisasi fiskal. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan belanja daerah pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan PAD, serta bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja rutin diharapkan akan memicu aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai (Badrudin, 2014). Keserasian belanja daerah dapat dicapai bila proporsi belanja modal lebih besar daripada belanja rutin (Halim, 2007). Melalui pengalokasian belanja modal yang tepat, maka akan memberikan dampak yang berkepanjangan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengalokasian anggaran belanja ke dalam pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014).

(Candra, 2016), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mirza, 2012), bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun hasil yang bertentangan terdapat pada penelitian

yang dilakukan oleh (Agung, 2016) dalam penelitiannya disebutkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil yang berbeda termuat pada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu, 2015), dalam penelitiannya menyatakan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, serta penelitian oleh (Vegirawati, 2012), yang menyatakan belanja modal tidak dapat memprediksi indeks pembangunan manusia.

Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus dalam bidang investasi swasta, mengingat Provinsi Bali dengan daya tarik wisatanya akan sangat berpeluang besar menjadi lahan investasi dari sektor swasta. Investasi swasta tersebut dapat bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA). Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu investasi publik ataupun swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap (Royan, 2015). Seiring dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang diserap maka akan sejalan dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen pengukuran IPM juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat akan mengakibatkan jumlah peningkatan IPM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Sumanto, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Royan, 2015), dalam penelitiannya disebutkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur Tahun 2010-2013. Hasil penelitian yang serupa juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marahendra, 2016), yaitu investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2013. Kedua penelitian yang dilakukan oleh (Royan, 2015) dan (Marahendra, 2016), sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susetyo, 2011) yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dalam penelitiannya disebutkan bahwa tingkat investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Kresnandra, 2016) dalam penelitiannya yang dilakukan di Provinsi Bali tahun 2009-2013, disebutkan bahwa investasi swasta mampu memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian terdahulu dapat menunjukkan bahwa jumlah investasi swasta yang diterima oleh suatu daerah dapat mempengaruhi capaian indeks pembangunan manusia.

Pengelolaan APBD tersebut perlu dilakukan secara serius, mengingat Provinsi Bali memiliki daya tarik objek wisata dan budaya. Hal ini merupakan potensi yang dapat mendukung penerimaan PAD yang besar setiap tahunnya. Selain itu dengan daya tarik objek wisata dan kebudayaan yang masih terjaga akan menjadi potensi untuk memancing masuknya investor dari pihak swasta yang dapat menanamkan modalnya di Provinsi Bali sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang cukup besar ini

diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga PAD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang merupakan pemeran utama dari dihasilkannya pendapatan tersebut. Strategi alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan tercermin dari IPM yang mengalami peningkatan.

Oleh karena adanya beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu merasa perlu untuk meneliti pengaruh dari desentralisasi fiskal, belanja modal, dan investasi swasta pada indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan dengan rentang waktu lima tahun dan dengan data yang terbaru. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2016)”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi pengaruh positif signifikan variabel desentralisasi dan investasi swasta pada indeks pembangunan manusia, dan mengkonfirmasi variabel belanja modal yang tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan, adapun kegunaan penelitian ini jika dilihat dari segi teoritis yakni mampu memberikan deskripsi yang lebih dalam mengenai desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia. Belanja modal tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Dari segi kegunaan praktisnya yakni dapat memberikan sumbangan pemikiran

berupa informasi penting bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari masing-masing daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian indeks pembangunan manusia.

Kajian pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan dan Teori *Fiscal Federalism*. (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. (Lane dalam Scott, 2000), menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Antara prinsipal dan agen sering terjadi masalah keagenan karena adanya konflik kepentingan yang dimiliki oleh principal dan agen. Adanya perbedaan kepentingan ini membuat masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif merupakan persoalan keagenan. Usulan yang diajukan oleh eksekutif (agen) memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif atau *agency* yang menjadi pengusul anggaran dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran tersebut berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran (Suryarini, 2012). Sementara itu, prinsipal sulit untuk mengawasi dan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh agen karena sedikitnya jumlah informasi yang dimiliki pihak prinsipal.

Teori keagenan sering dipraktikkan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan APBD (Adiwiyana, 2011). Pada sektor publik, pihak prinsipal yaitu masyarakat yang diproksikan oleh DPRD dan pemerintah daerah adalah agennya. Asimetri informasi berkaitan dengan efektivitas arus informasi dan interaksi antarprinsipal dan agen dalam melakukan tugas tertentu (Ahmad, dkk., 2012). Pada penelitian ini kaitan *agency theory* dapat dilihat dari hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Selaku agen, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri. Menurut (Gunantara, 2013) terkadang pada kenyataannya pemerintah daerah berperilaku oportunis dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan publik. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yaitu antara prinsipal dan agennya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama (konflik kepentingan) dan agen cenderung melakukan suatu tindakan yang memaksimalkan utilitasnya.

United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). (Artaningtyas, 2011), mengemukakan bahwa IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya pendapatan per kapita yang selama ini digunakan untuk

melihat kemajuan pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan konsep IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) (BPS, 2017). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100 yang berarti semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak, 2014).

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Siddik, 2002). (Khusaini, 2006) menyatakan desentralisasi fiskal adalah sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah. Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Perwujudan dari desentralisasi yaitu dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepada daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu otonomi fiskal pemerintah daerah dan pentingnya fiskal pemerintah daerah (Aristovnik, 2012). Otonomi fiskal pemerintah daerah berkaitan dengan transfer fiskal antar

pemerintah, pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kepentingan fiskal terhubung langsung dengan tingkat tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat dari seluruh pengeluaran pemerintah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Yusuf, 2014). Manfaat desentralisasi fiskal, pertama adalah efisiensi ekonomis (Widjayanto, 2013). Anggaran daerah untuk pelayanan publik dapat lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi. Manfaat kedua adalah peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Melalui rasio derajat desentralisasi, dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah (Prakoso, 2017).

(Prakoso, 2017) dalam penelitiannya disebutkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pambudi, 2008) yang meneliti pengaruh tingkat kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2006, menyebutkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2009:67). Belanja modal memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Agung, 2016).

(Candra, 2016), dalam penelitiannya disebutkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2008-2013. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mirza, 2012) yang menyebutkan belanja modal berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Belanja Modal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4). (Samuelson, 2004:198), menyatakan investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya *stock capital* dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

(Royan, 2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Tahun 2010-2013”, menyebutkan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian yang serupa juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marahendra, 2016), dimana investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2013. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Investasi Swasta berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi dari penelitian ini yakni pada Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat

Statistik Provinsi Bali. Sementara ruang lingkup dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah belanja modal dan investasi swasta yang mempengaruhi hubungan desentralisasi fiskal pada indeks pembangunan manusia. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data kuantitatif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampel jenuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali serta Laporan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali tahun 2012-2016 yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya dengan kurun waktu 5 tahun (2012-2016) sehingga jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 45 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linier Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel yang diteliti, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DF	45	2,9926098	82,3328158	24,540159034	21,6699469588
BM	45	49.010.249	949.069.337	201.209.441,29	204.953.455,416
IS	45	15.652.000	15.728.798.000	1.652.370.417,38	2.940.900.774,481
IPM	45	62,95	82,58	71,5664	5,56879
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan mengenai statistik deskriptif data yang digunakan pada penelitian ini, yakni Desentralisasi fiskal memiliki nilai rata-rata sebesar 24,540159034% yang berarti rata-rata setiap 1 rupiah dari total penerimaan daerah dikontibusi oleh 24,540159034% pendapatan asli daerah. Nilai standar deviasi sebesar 21,6699469588%. Nilai maksimum dari desentralisasi fiskal sebesar 82,3328158%, sedangkan nilai minimum dari desentralisasi fiskal sebesar 2,9926098%. Belanja modal (dalam ribu rupiah) memiliki nilai rata-rata sebesar 201.209.441,29; standar deviasi sebesar 204.953.455,416; nilai maksimum sebesar 949.069.337; dan nilai minimum sebesar 49.010.249. Investasi swasta (dalam ribu rupiah) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.652.370.417,38; nilai standar deviasi sebesar 2.940.900.774,481, nilai maksimum sebesar 15.728.798.000; dan nilai minimum sebesar 15.652.000. Indeks pembangunan manusia memiliki rata-rata sebesar 71,5664 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,56879. Nilai maksimum dari indeks pembangunan manusia sebesar 82,58, sedangkan nilai minimum dari indeks pembangunan manusia sebesar 62,95.

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari model persamaan yang diuji sebesar 0,177 kemudian hasil uji ini dibagi 2 untuk memperoleh nilai *Asymp. Sig.* Sehingga diperoleh nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,0885 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai *dw* yang dihasilkan sebesar 1.834. Oleh karena jumlah $n = 45$ dan $k = 3$, pada Tabel Durbin-Waston diperoleh nilai $d_L = 1.3832$ dan $d_U = 1.6662$ sehingga

diperoleh juga nilai $4 - d_U = 2.3338$, maka dapat dirumuskan kriteria $d_U < dw < 4 - d_U$ yaitu $(1.6662 < 1.834 < 2.3338)$. Hal ini menunjukkan data yang digunakan pada penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui nilai VIF dari variabel yang diuji (<10) dan nilai *tolerance* dari variabel yang diuji ($>0,1$). Hal ini menunjukkan data yang digunakan tidak mengandung gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat diketahui probabilitas nilai signifikansi dari variabel desentralisasi fiskal sebesar 0,936 ($>0,05$), variabel belanja modal sebesar 0,279 ($>0,05$), dan variabel investasi swasta sebesar 0,711 ($>0,05$). Oleh karena probabilitas nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel *absolute residual* berada diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 2.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	79,142	24,199		0,002	
DF	0,173	0,042	0,674	0,000	Diterima
lnBM	-2,031	1,366	-0,243	0,145	Ditolak
lnIS	1,330	0,366	0,427	0,001	Diterima
Adjusted R ²					0,618
Sig. F					0,000

Sumber : Data diolah, 2017

Melalui pengujian regresi linier berganda pada tabel diatas, maka dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM = 79,142 + 0,173 DF - 2,031 \ln BM + 1,330 \ln IS + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diatas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta 79,142 memiliki arti apabila probabilitas desentralisasi fiskal, belanja modal, dan investasi swasta sama dengan nol, maka IPM sebesar 79,142 satuan. Nilai koefisien regresi DF (Desentralisasi Fiskal) sebesar 0,173 memiliki arti apabila probabilitas desentralisasi fiskal naik sebesar satu satuan, maka IPM meningkat 0,173 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol. Nilai koefisien regresi lnBM (Belanja Modal) sebesar - 2,031 memiliki arti apabila probabilitas belanja modal naik sebesar satu satuan, maka IPM menurun 2,031 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol. Nilai koefisien regresi lnIS (Investasi Swasta) sebesar 1,330 memiliki arti apabila probabilitas investasi swasta naik sebesar satu satuan, maka IPM meningkat 1,330 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diamati mengenai Uji Kesesuaian Model (Uji F), Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*), dan Uji Statistik t (Uji t). Hasil dari pengujian kesesuaian model dalam penelitian ini telah disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil uji kesesuaian model pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *p-value* (*Sig. F*) yakni 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Koefisien determinasi dilihat melalui nilai *adjusted R²*. Adapun nilai dari *adjusted R²* pada penelitian ini telah disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan pada Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari *adjusted R²* pada persamaan pertama sebesar 0,618 dimana memiliki arti bahwa 61,8% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal, belanja

modal, dan investasi swasta. Sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model yang digunakan dalam persamaan pada penelitian ini. Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan $\alpha = 0,05$ pada Tabel 2, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji sebesar 0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ dengan nilai probabilitas koefisien regresi desentralisasi fiskal sebesar 0,173. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis H_1 pada penelitian ini diterima. Ketika tingkat kemandirian keuangan suatu daerah yang ditunjukkan dari nilai rasio desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang diukur melalui pencapaian IPM daerah tersebut. Hal ini dikarenakan ketika suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang baik, maka pemerintah daerah tersebut akan mampu untuk mengelola pendapatan daerahnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan publik, menjalankan aktivitas pemerintahan dengan baik, serta membiayai pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang diukur dengan pencapaian IPM daerah tersebut. Penerapan sistem pemerintahan terdesentralisasi, akan membuat pemerintah daerah dikejar untuk meningkatkan

usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto, dkk., 2009).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Pambudi, 2008) pada penelitiannya yang menyatakan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri, dimana tujuan utama dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2017) dalam penelitiannya disebutkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan kajian yang ditulis oleh (Tasrin, 2012), dalam kajiannya disebutkan bahwa desentralisasi fiskal belum dapat menunjukkan pengaruhnya secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji sebesar 0,145 yang menunjukkan angka lebih besar daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 0,05$ dengan nilai probabilitas koefisien regresi belanja modal sebesar -2,031. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia dan arah pengaruhnya negatif, sehingga hipotesis H_2 pada penelitian ini ditolak. Dari hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruhnya belanja modal pada IPM dengan arah pengaruhnya negatif. Hal ini diduga terjadi karena alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum tepat sasaran, dimana belanja modal tersebut belum maksimal dalam bidang-bidang yang menjadi indikator pengukuran kesejahteraan

masyarakat seperti dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pelayanan publik lainnya.

Tidak berpengaruhnya belanja modal pada IPM juga dapat disebabkan oleh adanya proyek pemerintah yang tersendat bahkan gagal, serta proyek belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tetapi manfaatnya baru akan dapat dirasakan oleh masyarakat ketika beberapa tahun ke depan. Sehingga menyebabkan anggaran belanja modal yang besar pada tahun berjalan, namun manfaatnya tidak dapat dirasakan ketika tahun berjalan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu, 2015) dalam penelitiannya menyatakan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agung, 2016) dalam penelitiannya disebutkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candra, 2016) dan (Sari, 2016), dalam penelitiannya disebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji sebesar 0,001 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 0,05$ dengan nilai probabilitas koefisien regresi investasi swasta sebesar 1,330. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis H_3 pada penelitian ini diterima. Ketika tingkat investasi yang dilakukan oleh pihak swasta pada suatu daerah meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan

kesejahteraan masyarakatnya yang diukur melalui pencapaian IPM daerah tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta maka akan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja. Sehingga akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang berdampak dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi rakyat dapat berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori Harrod- Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi, dimana pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi juga akan berdampak pada pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Royan, 2015), dalam penelitiannya disebutkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marahendra, 2016), yaitu investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh positif pada IPM. Belanja modal tidak berpengaruh pada IPM. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran yakni, pemerintah daerah

serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari masing-masing daerah agar dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal, lebih memperhitungkan kembali dalam pengelolaan anggaran belanja modal setiap daerah, serta melakukan pengelolaan terhadap investasi agar dapat merata dan lebih memberikan perhatian kepada investor swasta agar dapat memupuk pertumbuhan investasi swasta pada masing-masing daerah di Provinsi Bali guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian indeks pembangunan manusia.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali, hanya menggunakan tiga variabel bebas untuk menjelaskan perubahan IPM, serta hanya menggunakan rentang waktu lima tahun. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa, namun dengan tambahan variabel bebas, variabel pemoderasi atau variabel mediasi yang masih memiliki korelasi dengan IPM, menggunakan rentang tahun yang lebih panjang mengingat pertumbuhan dari IPM memerlukan waktu yang tidak singkat, serta mengambil objek penelitian di luar wilayah Provinsi Bali agar hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil penelitian di daerah lain.

REFERENSI

- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Agung, I G A. 2016. Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.1 Hal: 695-722.

- Ahmad, Abd.R., Alan Farley & Moonsamy Naidoo. 2012. Analysis of Government-University Relationship from the Perspective of Agency Theory. *Journal of Education and Practice*, 3(6).
- Aristovnik, A. 2012. Fiscal decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective. *MPRA Paper No. 39316*, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
- Artaningtyas, Wahyu Dwi., Akhmad Syari'udin, dan Tri Maryani. 2011. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Buletin Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, pp: 51-58.
- Badrudin, Rudy. 2011. Effect of Fiscal Decentralization On Capital Expenditure, Growth, and, Welfare. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(3) pp: 211-223.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2016*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- _____. 2017. *Bali Dalam Angka 2016*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Candra, Ida Ayu. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pemabangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.15.3 Hal: 2409-2438.
- Gunantara, Putu Candra. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.7.3 Hal: 529-546.
- Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai: *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Isnaeni, Virtq Putri. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik, desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNBA W.
- Kresnandra, Anak Agung Ngurah Agung. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol.3 No.2

- Marahendra, Wawan Dedi. (2016). Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Meckling, WH. dan Jensen, MC. 1976. *Theory of the Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. 3, 1976.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. 1 (1), h:1-15.
- Musgrave, Richard. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw.
- Ndakularak, Erwin, Nyoman Djinar Setiawina dan I Ketut Djayastra, 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3), h: 140-153.
- Oates, W.E. 1972. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. *National Tax Journal* 46
- Otley, David. T, 1980. The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. *Accounting Organization and Society*. Vol. 5. 413-428.
- Pambudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Prakoso, Laurensius Indro. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung. *Tesis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

- Richardson, Kojo Edeme. 2014. Analyzing the Effects of Sectoral Public Spending On Human Development in Nigeria: Evidence from Panel Data. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Vol.19.9
- Royan, Mohamad Miftahur, Aisah Jumiati, dan Fajar Wahyu Prianto. 2015. Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*.
- Samuelson, Paul, A.. 2004. Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization. *Journal of Economic Perspectives*. 18(3): 135-146.
- Sari dan Supadmi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15.3. ISSN: 2302-8556.
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory. Second edition*. Canada: Prentice Hall.
- Siddik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Bandung.
- Solikin, Ikin. 2007. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*.
- Suhardjanto, D., Eni Jufriyah Sulistyorini dan Sri Hartoko. 2009. The Influence of Fiscal Decentralization On The Public Expenditure in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*. 13(3), h: 233-252.
- Sumanto, T.R.A. 2012. Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas XI Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Moyudan Sleman. *Jurnal Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: YKPN.
- Suryarini, Trisni. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 2(1), h: 207-216.
- Tasrin, Krismiyati. (2011). Study on the Impact of Decentralization Policy on the Quality of Local Public Services in the Education Sector, Case Study: West Java Province, Indonesia. *Tesis*. Kobe University.
- UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press

- Wahyu, I Putu Adita. 2015. Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 12.3
- Widjayanto, Wahyu. (2013). *Modul Tinjauan dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*.
- Yusuf, Noor Andi Fakhruddin. 2014. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.